



PENGUATAN POKDARWIS BERBASIS *COMMUNITY-BASED TOURISM* SEBAGAI FONDASI SOSIAL *PRENEURSHIP* DI DESA CAMPAKASARI**Oleh****Endang Ahmad¹, Silvia Septiyani Koswara², Putra Hanifan Graha³, Fanji Lesmana⁴, Indah Kesuma Wardani Gafar⁵, Deliska Marta Manggala Putri⁶**^{1,2,3,4,5,6}Politeknik JatiluhurEmail: ¹endangahmad@polijati.ac.id, ²silviakoswara@polijati.ac.id,³putrahanifan@polijati.ac.id, ⁴fanjilesmana@polijati.ac.id,⁵indahkesuma@polijati.ac.id, ⁶deliska@polijati.ac.id

Article History:

Received: 23-01-2026

Revised: 15-02-2026

Accepted: 26-02-2026

Keywords:Desa Wisata,
POKDARWIS,
Community-Based
Tourism, Social
Preneurship,
Keberlanjutan

Abstract: Desa Campakasari Kabupaten Purwakarta memiliki potensi wisata alam Situ Cigangsa yang belum dikelola secara optimal akibat belum terbentuknya kelembagaan pariwisata, rendahnya kesadaran sadar wisata masyarakat, serta belum terintegrasinya pengembangan destinasi dengan pendekatan sosial preneurship. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membentuk dan memperkuat Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) melalui pendekatan *community-based tourism* (CBT) yang partisipatif dengan melibatkan Ibu PKK dan pemuda desa sebagai motor penggerak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif partisipatif melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi reflektif, dengan analisis data menggunakan teknik reduksi dan interpretasi tematik. Kegiatan ini melibatkan 20 peserta yang terdiri atas anggota PKK dan pemuda desa. Hasil program menunjukkan terbentuknya struktur organisasi POKDARWIS yang representatif, meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi wisata desa, serta munculnya komitmen kelembagaan dalam pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Integrasi CBT dan konsep sosial preneurship menjadi fondasi strategis dalam membangun tata kelola lokal yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu strategi utama pembangunan ekonomi lokal berbasis komunitas di Indonesia. Transformasi paradigma pembangunan pariwisata dari model top-down menuju *community-based tourism* (CBT) menunjukkan pergeseran fokus dari eksploitasi sumber daya menuju pemberdayaan masyarakat (UNWTO, 2020). CBT menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Secara konseptual, CBT tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, identitas budaya, dan keberlanjutan lingkungan (Goodwin, 2016). (OECD/European Union., 2025; OECD, 2020) menegaskan bahwa desa



wisata berbasis komunitas yang memiliki struktur kelembagaan kuat dan partisipasi kolektif tinggi cenderung lebih resilien terhadap tekanan ekonomi maupun sosial.

Konsep *social preneurship* dalam konteks pariwisata desa juga sejalan dengan pendekatan ekonomi sosial yang menekankan pada penciptaan nilai sosial, tata kelola partisipatif, serta reinvestasi manfaat ekonomi bagi komunitas. Ekonomi sosial diakui sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan karena mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, inklusi sosial, dan penguatan ketahanan komunitas (OECD/European Union., 2025). Dengan demikian, penguatan POKDARWIS tidak hanya berorientasi pada aktivitas wisata, tetapi juga pada pembentukan ekosistem ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, (Kemenparekraf, 2021) mendorong pengembangan desa wisata melalui klasifikasi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Namun, berbagai penelitian lemahnya koordinasi organisasi, minimnya perencanaan strategis, serta rendahnya kapasitas manajerial masyarakat sering kali menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas (Kontogeorgopoulos et al., 2014). Dengan kata lain, persoalan utama bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada kesiapan sosial dan kelembagaan.

Desa Campakasari di Kabupaten Purwakarta memiliki potensi wisata alam berupa Situ Cigangsa yang secara lanskap memiliki nilai daya tarik wisata. Namun demikian, potensi tersebut belum dikelola secara sistematis dan terstruktur. Kondisi ini mencerminkan fenomena umum desa wisata rintisan, yaitu:

- Belum terbentuknya kelembagaan formal pengelola wisata.
- Rendahnya kesadaran sadar wisata masyarakat.
- Minimnya integrasi antara pengembangan wisata dan pemberdayaan ekonomi lokal.



Gambar 1

Sumber: Google Foto Situ Cigangsa

Secara teoritis, pembangunan desa wisata membutuhkan fondasi kelembagaan yang mampu mengorganisasi partisipasi masyarakat (Rahim, 2012). Tanpa organisasi lokal seperti POKDARWIS, aktivitas wisata cenderung sporadis, tidak terkoordinasi, dan sulit berkelanjutan.

Selain persoalan kelembagaan, tantangan lain adalah belum terbangunnya paradigma ekonomi berbasis sosial preneurship. Konsep sosial preneurship menggabungkan orientasi sosial dan ekonomi dalam satu kerangka keberlanjutan (Santos, 2012). Model ini sangat



relevan bagi desa wisata, karena memungkinkan pengembangan produk wisata yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

Dalam konteks Desa Campakasari, keterlibatan Ibu PKK dan pemuda desa menjadi aspek strategis. Secara sosiologis, kedua kelompok ini memiliki posisi sentral dalam dinamika sosial desa. Ibu PKK memiliki jaringan sosial yang kuat dan legitimasi dalam kehidupan komunitas, sedangkan pemuda desa memiliki potensi inovasi dan adaptasi teknologi. Integrasi kedua kelompok ini dapat menciptakan model pembangunan wisata yang inklusif dan partisipatif.

Lebih jauh, pembangunan desa wisata berbasis sosial preneurship juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya:

- SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
- SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)
- SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

Dengan demikian, intervensi pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi memiliki relevansi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara potensi wisata Situ Cigangsa dan kesiapan kelembagaan serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, program pendampingan penguatan POKDARWIS melalui pendekatan CBT dan sosial preneurship menjadi strategi intervensi yang relevan

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial, perubahan persepsi, serta proses pembentukan kelembagaan secara mendalam dalam konteks komunitas (John W. Creswell, 2018). Metode ini relevan untuk kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat karena fokus utamanya adalah interpretasi makna dan transformasi sosial.

Model partisipatif digunakan karena pembangunan desa wisata berbasis *community-based tourism* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pengelolaan destinasi (Chambers, 2014; Pretty, 1995). Dalam pendekatan ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses penguatan kelembagaan, sementara masyarakat berperan aktif dalam proses diskusi, pengambilan keputusan, dan pembentukan struktur organisasi.

Kegiatan ini melibatkan 20 peserta yang terdiri dari anggota Ibu PKK dan pemuda desa. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki posisi strategis dalam struktur sosial Desa Campakasari dan berpotensi menjadi penggerak utama dalam pembentukan POKDARWIS.

Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi reflektif. Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membangun legitimasi sosial program. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi partisipatif, serta refleksi bersama terkait pembentukan POKDARWIS dan pengembangan wisata Situ Cigangsa.



Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif dan diskusi reflektif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data sebagaimana dikemukakan oleh (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan, khususnya terkait perubahan kesadaran kolektif dan kesiapan kelembagaan. Hasil reduksi kemudian ditafsirkan secara tematik untuk menarik kesimpulan mengenai capaian program. Pendekatan ini sesuai dengan karakter kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada transformasi sosial dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Pembentukan POKDARWIS

Pembentukan POKDARWIS di Desa Campakasari bukan sekadar pembentukan struktur organisasi formal, tetapi merupakan proses institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata desa. Secara teoritis, kelembagaan lokal merupakan fondasi utama dalam pengembangan *community-based tourism* karena berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, distribusi peran, dan pengambilan keputusan kolektif (Goodwin, 2016; UNWTO, 2020)

Komposisi anggota yang terdiri dari Ibu PKK dan pemuda desa mencerminkan integrasi modal sosial horizontal dan vertikal. Dalam perspektif modal sosial (Putnam, 2000), kolaborasi lintas generasi memperkuat kepercayaan sosial (*trust*) dan memperluas jaringan partisipasi (*civic engagement*). Ibu PKK memiliki legitimasi sosial dalam struktur kemasyarakatan desa, sedangkan pemuda desa memiliki kapasitas inovasi dan adaptasi terhadap teknologi digital.

Dalam konteks teori kelembagaan, pembentukan organisasi lokal meningkatkan legitimasi sosial dan memperkuat keberlanjutan program (Rahim, 2012). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kontogeorgopoulos et al., 2014) yang menekankan bahwa kepemimpinan lokal dan dukungan komunitas menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan *community-based tourism*. Dengan demikian, pembentukan POKDARWIS di Desa Campakasari bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan upaya strategis membangun fondasi tata kelola lokal yang resilien. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Campakasari telah memasuki fase awal penguatan struktur sosial sebagai prasyarat desa wisata berkelanjutan. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa integrasi PKK dan pemuda sebagai *dual social capital* (Woolcock, 1998) belum banyak dibahas dalam model CBT konvensional.



Gambar 3.1 Data Peneliti

1.2. Peningkatan Kesadaran Kolektif

Salah satu capaian paling signifikan dalam program ini adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi wisata Situ Cigangsa. Kesadaran kolektif dalam CBT menjadi faktor kunci keberhasilan destinasi berbasis komunitas (UNWTO, 2020).

Perubahan kesadaran ini ditunjukkan oleh:

- Pergeseran persepsi dari “ruang publik biasa” menjadi “aset ekonomi desa”.
- Meningkatnya diskusi informal terkait peluang usaha wisata.
- Inisiatif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Dalam perspektif teori perubahan sosial, transformasi kesadaran masyarakat merupakan tahap awal dari proses inovasi sosial (Rogers, 2003). Ketika masyarakat mulai menerima ide bahwa pariwisata dapat menjadi sumber kesejahteraan bersama, maka proses difusi inovasi telah berjalan.

Selain itu, peningkatan kesadaran kolektif juga memperkuat *sense of ownership* terhadap destinasi wisata. (OECD, 2020) menyatakan bahwa desa wisata yang memiliki tingkat kepemilikan sosial tinggi cenderung lebih tahan terhadap konflik internal dan tekanan eksternal.

Dari perspektif sosial preneurship (Santos, 2012), perubahan mindset masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun model usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, masyarakat Campakasari menunjukkan kesiapan untuk bergerak dari tahap kesadaran menuju tahap implementasi.

1.3. Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi oleh konsistensi pengelolaan kelembagaan dan keberlanjutan partisipasi masyarakat (Goodwin, 2016). Oleh karena itu, strategi keberlanjutan yang disusun dalam program ini memiliki tiga dimensi utama:

1. Dimensi Kelembagaan

Roadmap pengembangan disusun untuk memastikan bahwa POKDARWIS memiliki arah kerja yang jelas. Roadmap ini mencakup target jangka pendek (penguatan organisasi), jangka



menengah (pengembangan produk wisata), dan jangka panjang (ekspansi jejaring kemitraan).

Dalam teori pembangunan berkelanjutan, perencanaan jangka panjang mengurangi risiko stagnasi organisasi (UNWTO, 2020).

2. Dimensi Sosial

Digitalisasi komunikasi melalui grup WhatsApp berfungsi menjaga kohesi sosial dan mempercepat koordinasi internal. Pendekatan ini sejalan dengan transformasi digital desa wisata yang direkomendasikan (OECD, 2020).

Selain itu, sistem mentoring internal memperkuat pembelajaran horizontal antar anggota, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendamping eksternal.

3. Dimensi Ekonomi

Integrasi sosial preneurship memastikan bahwa setiap pengembangan produk wisata memiliki dampak ekonomi yang inklusif. Misalnya:

- Pelibatan Ibu PKK dalam produksi kuliner lokal.
- Pemuda desa sebagai pemandu wisata dan pengelola daya tarik wisata.

Model ini mencerminkan pendekatan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan) dalam pembangunan berkelanjutan (Elkington, 1998).

Secara konseptual, strategi keberlanjutan ini menunjukkan bahwa Desa Campakasari tidak hanya berfokus pada pembentukan organisasi, tetapi telah memasuki tahap penguatan sistem pengelolaan destinasi.

1.4. Indikator Dampak Program

Dampak program pendampingan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator perubahan sosial yang muncul pasca intervensi. Pertama, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam forum diskusi terkait pengembangan wisata desa. Kedua, munculnya inisiatif kolektif dalam penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas dalam POKDARWIS. Ketiga, adanya komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar Situ Cigangsa sebagai bagian dari implementasi sadar wisata.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan terjadinya proses pemberdayaan masyarakat, yang menurut (Scheyvens, 2002) ditandai dengan meningkatnya kontrol lokal terhadap sumber daya dan penguatan kapasitas organisasi komunitas. Dengan demikian, dampak program tidak hanya bersifat administratif berupa pembentukan organisasi, tetapi juga menyentuh aspek transformasi sosial dan kelembagaan.

1.5. Keterbatasan Program

Meskipun program menunjukkan hasil positif pada tahap awal, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, durasi pendampingan yang relatif singkat belum memungkinkan dilakukan evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas kinerja POKDARWIS. Kedua, pengukuran dampak masih bersifat kualitatif dan belum dilengkapi dengan instrumen kuantitatif yang terstandar. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan eksternal seperti pelaku industri dan pemerintah daerah masih berada pada tahap awal.

Literatur menunjukkan bahwa keberlanjutan kelembagaan desa wisata memerlukan monitoring berkelanjutan, penguatan jejaring eksternal, serta dukungan kebijakan yang konsisten (Goodwin, 2016; UNWTO, 2020). Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan untuk memastikan stabilitas dan perkembangan organisasi yang telah terbentuk



KESIMPULAN

Program pendampingan penguatan POKDARWIS di Desa Campakasari berhasil mencapai tujuan utama yaitu terbentuknya organisasi POKDARWIS yang solid dan representatif. Organisasi ini beranggotakan 20 orang yang terdiri dari Ibu PKK dan pemuda desa, dengan struktur kepengurusan yang disepakati bersama. Kolaborasi lintas generasi ini menjadi kekuatan utama dalam membangun fondasi pengembangan wisata Situ Cigangsa.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan juga berhasil meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi wisata desa. Masyarakat mulai memandang Situ Cigangsa sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan sadar wisata dan sapta pesona. Integrasi konsep sosial preneurship dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah, karena pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan penguatan kohesi masyarakat.

Meskipun demikian, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu peserta dan perbedaan tingkat pemahaman. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan sistem pembelajaran fleksibel melalui media digital serta pendekatan mentoring berjenjang antar anggota. Strategi ini menjadi solusi awal dalam menjaga keberlanjutan proses pembelajaran dan penguatan organisasi.

Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan yang terstruktur. Tahap pertama difokuskan pada penguatan manajemen organisasi dan penyusunan master plan pengembangan wisata desa. Tahap kedua diarahkan pada implementasi produk wisata dan promosi berbasis digital. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dan kemitraan eksternal, Desa Campakasari memiliki peluang untuk berkembang dari tahap rintisan menuju desa wisata yang lebih matang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chambers, R. (2014). *Rural Development Putting the last first*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- [2] Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- [3] Goodwin, H. (2016). *Responsible tourism: using tourism for sustainable development* (2nd ed.). Goodfellow.
- [4] John W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed., Vol. 5). Sage Publications.
- [5] Kemenparekraf. (2021). *Pedoman Desa Wisata*.
- [6] Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Tourism Planning and Development*, 11(1), 106–124. <https://doi.org/10.1080/21568316.2013.852991>
- [7] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- [8] OECD/European Union. (2025). Labels for the Social Economy. In *Local Economic and Employment Development (LEED)*. [https://www.oecd.org/en/publications/labels-for-the-social-economy_f513fd53-en.html%0Afiles/1277/OECD and Union - 2025 - Labels](https://www.oecd.org/en/publications/labels-for-the-social-economy_f513fd53-en.html%0Afiles/1277/OECD%20and%20Union%20-%202025%20-%20Labels)



- for the Social Economy.pdf
- [9] OECD. (2020). *OECD Tourism Trends and Policies 2020*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>
 - [10] Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
 - [11] Putnam, R. (2000). *Bowling alone: the collapse and revival of American community*. Touchstone Books/Simon & Schuster. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/358916.361990>
 - [12] Rahim, F. (2012). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*.
 - [13] Santos, F. M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335–351. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1413-4>
 - [14] Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Prentice Hall.
 - [15] UNWTO. (2020). UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an Effective Tool for Rural Development. *UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an Effective Tool for Rural Development*. <https://doi.org/10.18111/9789284422173>
 - [16] Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy. *The Journal of Economic Perspectives*, 3(4), 99–117.